

---

*Analysis of Regional Taxes, Regional Levies, and Results of Separated Regional Wealth Management Against Regional Original Income of Semarang Regency in 2016-2019*

**Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019**

**Natasha Yokoansei Kireina<sup>1)</sup>, Andri Octaviani<sup>2)</sup>**  
Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa Surakarta  
[natashayokoansei287@gmail.com](mailto:natashayokoansei287@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to analyze Regional Taxes, Regional Levies and Results of Separated Regional Wealth Management Against Regional Original Revenues of Semarang Regency in 2016-2019. This study uses a quantitative descriptive approach. The population used in this study is the report on the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Semarang Regency in 2016-2019. The sampling technique in this research is the documentation technique, namely by recording, and analyzing the Semarang Regency APBD Realization Report. The analysis technique used is descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression, t test, F test, and coefficient of determination (R<sup>2</sup>). The results of this study indicate that Regional Taxes have a positive and significant effect on Regional Original Income, Regional Levies have a positive and significant effect on Regional Original Income and Separated Regional Wealth Management Results have a positive and significant effect on Regional Original Income. The F test result is 0.000, which means that three independent variables simultaneously have a significant effect on Regional Original Revenue. The coefficient of determination (R<sup>2</sup>) shows the results of Regional Original Income of 98.5% by the independent variable and the remaining 1.5% is influenced by other factors not examined in this study.*

**Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Results of Separated Wealth Management, Regional Original Income**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencatat, dan menganalisis Laporan Realisasi APBD Kabupaten Semarang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji F sebesar 0,000 yang berarti tiga variabel independen secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah sebesar 98,5% oleh variabel independen dan sisanya 1,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah**

**PENDAHULUAN**

Suatu negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya dan mensejahterakan rakyatnya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka daerah berhak untuk mengatur penuh daerahnya termasuk dalam hal pendapatan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga masing-masing daerah

diharapkan bisa lebih mengetahui potensi pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Pembangunan yang dimaksud merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada dimiliki oleh daerah tersebut, oleh karena itu setiap daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi daerahnya agar pendapatan daerah meningkat dan mampu secara mandiri membangun daerahnya. Adanya berbagai potensi daerah tersebut tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mampu membantu menyumbang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah disektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

Kabupaten Semarang yang juga dikenal dengan banyaknya destinasi wisata yang berdiri di sekitarnya, baik wisata alam, budaya maupun modern membuat industri hiburan dan penginapan di Kabupaten Semarang berkembang pesat, karena Kabupaten Semarang memiliki berbagai sumber PAD. PAD menjadi faktor yang sangat penting bagi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Semarang, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya keras untuk memaksimalkan PAD.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk terus menggali sumber pendapatan di daerahnya masing-masing dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam upaya untuk meningkatkan sektor perekonomian. Pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah berusaha untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di masing-masing daerah. Akan tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dipungut selama ini. Banyaknya sumber PAD di wilayah Kabupaten Semarang cukup menarik untuk diteliti kontribusinya bagi pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang adalah Pajak dan Retribusi seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pajak hotel dan pajak restoran ini merupakan salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang. Begitu juga dengan Retribusi Hotel dan Restoran yang banyak berdiri di sepanjang jalan menuju ke obyek wisata. Potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang seperti pembangunan hotel dan restoran di sekitar wilayah obyek wisata berkembang cukup pesat. Sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar Kabupaten Semarang, pemerintah daerah berusaha keras untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.

Fenomena yang ada, Pendapatan Daerah Asli Kabupaten Semarang mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2017-2019. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang, berikut rinciannya:

Tabel 1.1  
Data Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah	318.536	417 417	383 476	34 140
2	Pajak Daerah	105.768	168 523	152 257	13 746
3	Retribusi Daerah	26.868	30 912	31 931	3 027

---

4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.525	23 016	9 874	0
---	---	--------	--------	-------	---

Sumber : Badan Keuangan Daerah,2020

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, pemerintah Kabupaten Semarang masih berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali sumber pendapatan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam upaya untuk meningkatkan sektor perekonomian. Pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah berusaha untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di masing-masing daerah. Akan tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan atau penerimaan yang diterima dalam kas daerah, yang bersumber dari wilayahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2004:67). Berdasarkan pengertian tersebut maka segala pendapatan yang berada di wilayah daerah menjadi kewenangan daerah masing-masing. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), juga dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum mengenai PAD diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pemertintah pusat dan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut komponen-komponen PAD yang dimaksud meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang saham.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Yani, 2008). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Semarang pada 2018 menembus Rp4,23 triliun. Adapun pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penopang pembangunan daerah dengan kontribusi senilai Rp1,82 triliun atau 43% dari total pendapatan 2018. Sementara itu, dana perimbangan yang diterima daerah ini senilai Rp1,44 triliun atau sebesar 34% dari total pendapatan daerah. Komponen lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi paling rendah, yaitu Rp974 miliar atau sebesar 23%. Apabila diperinci, penerimaan daerahnya didominasi oleh pajak daerah. Kontribusi pajak daerahnya mencapai Rp1,33 triliun atau sebesar 73% dari total PAD pada 2018. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah dan retribusi daerah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 19% dan 6% dari total PAD.

Penelitian mengenai Pajak Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Puja (2019) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Peneliti dari Wulan (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian selanjutnya oleh Krisna (2013) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan Dedi (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian Yusuf (2020) menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim dan Nasir, 2006). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi adalah sebagai pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dengan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya (Siahaan, 2005).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup 3 bagian, yaitu: Pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Adapun Rumus untuk mencari hasil Pendapatan Asli Daerah menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Pajak Daerah

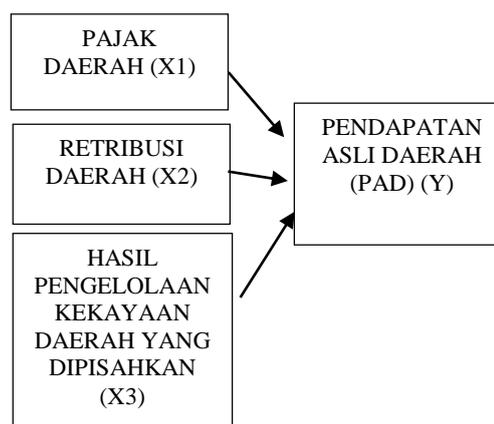
X2 = Retribusi Daerah

X3 = Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

e = Standar Error

Adapun beberapa rangkuman kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu Md. Krisna ArtaAnggar Kusuma, dkk (2013), Puja Risqy Ramadhan (2019), Yusuf Hafandi, dkk (2020)

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



Sumber : Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, dkk (2013), Puja Risqy Ramadhan (2019), Yusuf Hafandi, dkk (2020).

## METODE

Obyek penelitian yang dilakukan yaitu Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang. Populasi dalam penelitian ini yaitu data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh, dimana semua anggota sampel populasi digunakan. Sampel dalam penelitian ini yaitu dokumen yang berisi laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang yang dimana obyek periode 2016-2019 berjumlah 48 yang diperoleh dari 12 bulan dikali 4 tahun dan diperoleh dari Badan Keuangan Daerah itu sendiri. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini terdapat empat variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih”. Hasil “bersih” sebagai dasar proses analisis data seperti hasil perhitungan statistik dan untuk proses pengujian hipotesis. Hasil bersih meliputi Tabel dan grafik hasil perhitungan statistik, persamaan regresi yang dihasilkan dan gambar Model Hasil Analisis sebagai dasar untuk pembahasan.

## PEMBAHASAN

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang tahun 2016-2019 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan Pajak Daerah memberikan sumbangan paling besar pada Pendapatan Asli Daerah dan sangat berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam data laporan realisasi APBD dari BKUD Kabupaten Semarang, Pajak Daerah ditentukan target yang akan diperoleh setiap tahunnya. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2016-2019 selalu melampaui target yang telah ditetapkan, yang dimana kontribusi terbesar pajak daerah berasal dari PBB, Pajak Penerangan jalan, Pajak Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian MD. Krisna Arta Anggar Kusuma, dkk (2013) yang menjelaskan bahwa hasil Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang tahun 2016-2019 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga berperan penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun Retribusi Daerah tidak selalu melampaui target yang ditentukan, namun pendapatan yang diperoleh selalu meningkat setiap tahunnya selama periode 2016-2019. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Puja Risqy Ramadhan (2019) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan hasil penelitian saya signifikan meskipun mengalami naik turunnya pendapatan yang terjadi, sedangkan dalam hasil penelitian Yusuf Hafandi tidak signifikan. Hasil dari penelitian bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hafandi, dkk (2020) yang menjelaskan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan setelah melalui beberapa tahap-tahap, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019.
2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019.

4. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) memperoleh nilai 0,993 yang artinya variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah) memberikan pengaruh baik dan positif terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

### **Saran**

Berdasarkan dari seluruh hasil penelitian ini, dapat digunakan oleh pihak yang bersangkutan dengan masalah Laporan Keuangan Kabupaten Semarang. Berikut adalah beberapa saran dari peneliti yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah cukup baik karena memberikan sumbangan paling besar pada Pendapatan Asli Daerah yang dimana kontribusi terbesar pajak berasal dari PBB, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Maka, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang untuk lebih menekankan Pajak Daerah tersebut terutama sumber-sumber yang berkontribusi.
2. Hasil Retribusi dapat dikatakan baik meskipun tidak selalu melampaui target yang ditetapkan namun cukup berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka, diharapkan untuk melakukan pengawasan lebih terhadap pemungut Retribusi Daerah dalam menyeter hasil pungutan tersebut.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka, diharapkan untuk bisa memudahkan pembayaran PDAM baik secara online maupun offline supaya kontribusi laba dari BUMD dapat meningkat.

Berdasarkan saran yang telah dipaparkan diatas, penulis berharap pemerintah daerah Kabupaten Semarang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Semarang dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Hidayat. 2017. Uji Asumsi Klasik Regresi Linear dengan SPSS. Diakses pada 22 Januari 2017.
- Dedi Suharyadi dkk. 2018. Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. E-Journal. Jakarta : Bogor.
- Hilmy Syarafuddin Wijoyo dkk. 2019. Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi. Kediri : Universitas Kediri.
- Jogloabang. 2019. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Lily Sintia Bambang Suryono. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- MC Kabupaten Semarang. 2019. Realisasi PAD Kabupaten Semarang.
- Md. Krisna Arta Anggar Kusuma 1), Ni Gst. Putu Wirawati 2). 2013. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. E- Jurnal Akuntansi. Bali : Universitas Udayana (Unud).
- Portal Resmi Kementerian Keuangan. 2018. Pajak Daerah Portal Resmi Kementerian Keuangan. 2018.
- Retribusi Daerah Puja Rizqy Ramadhan. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Sumatera Utara : Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Riadi Muchlisin. 2015. Pendapatan Asli Daerah.
- Syafnidawaty. 2020. Populasi dan Sampe.
- Tedy Iswahyudi. 2020. Objek Retribusi Daerah.
- Wulan Purnama Sari 1) Miftahuljannah 2). 2019. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). E-Journal Equilibrium Manajemen. Pontianak : Universitas Muhammadiyah
- Yusuf Hafandi 1), Romandhon 2). 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech). Wonosobo : Universitas Sains Al-Qur'an
- Zul Firman. 2020. Apa itu Retribusi Daerah